

Policy Brief MENJAUHKAN ASN DARI LINGKARAN SETAN JUDOL DAN PINJOL

Tim Penulis: Mayahayati Kusumaningrum, Tri Noor Aziza & Ricky Noor Permadi

Policy Brief ini Ditujukan kepada:

- Pemerintah Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa waktu lalu, MenPAN RB, Rini Widyantini mengingatkan perlunya me-rebranding ASN untuk selalu menjaga citra baik diri dan pemerintah dengan adanya kejadian-kejadian terhadap oknum-oknum ASN yang terlibat judi online, pinjaman online atau banyak hal lain. Kemudahan mengakses konten judi dan pinjaman online, beraneka ragam bentuk judi online juga dinilai semakin mempermudah orang terjatuh dalam 'candu' judi dan menjadi tantangan besar bagi pemberantasannya. Secara tidak langsung, keterlibatan PNS dalam lingkaran judi online ataupun pinjaman online dapat berdampak pada kinerja organisasi dan penurunan pelayanan publik. Terdapat urgensi untuk mengatasi judi online dan terjatuh pada pinjaman online di Indonesia.

PENDAHULUAN

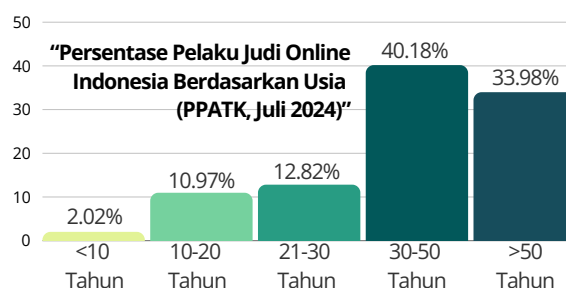
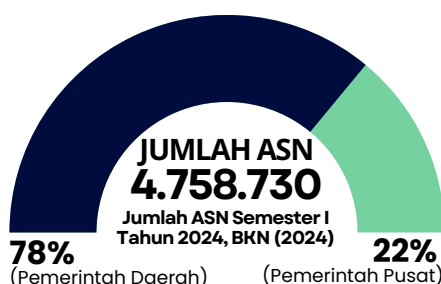
Perjudian online semakin menjamur di tengah masyarakat Indonesia. Judi online menyebabkan kecanduan yang menjadi biang dari sejumlah permasalahan sosial. Menyusutnya produktivitas karena banyak waktu terbuang, terabaikannya kebutuhan primer keluarga, hingga terlilit utang termasuk terlibat pinjaman online yang selanjutnya menjadi 'lingkaran setan' (vicious circle) berdampak buruk jika tidak ditangani. Situasi ini mendesak di Indonesia karena meskipun ada upaya keras dari pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi yang memblokir lebih dari 800.000 konten perjudian online dari Juni 2018 hingga 7 Agustus 2023 (kompas.id), namun situs perjudian baru terus bermunculan, yang mencerminkan permintaan tinggi yang terus-menerus dan tantangan penegakan hukum yang signifikan (Kominfo, 2024).

Bahkan, beberapa waktu lalu, banyak media massa yang memberitakan terkait keterlibatan beberapa pegawai Kemenkomdigi yang menjadi "beking" situs judi online, dan cukup banyak ASN di beberapa daerah yang terjatuh judi online dan pinjaman online. Untuk mengurangi dampak

negatif dan keterlibatan ASN dalam perjudian online pun KemenPAN RB telah menerbitkan Surat Edaran nomor 5 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Online di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan SE ini, Pemerintah telah berupaya mensosialisasi dan mengkampanyekan Gerakan anti perjudian online baik melalui media elektronik yang memuat tulisan, foto, grafis, bahkan Surat Edaran yang juga dimuat di media sosial, ataupun himbauan langsung dan kegiatan edukatif, seperti yang telah dilakukan beberapa instansi hingga saat ini. Kampanye ini pun dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak baik akademisi, OJK, penyuluh hukum, hingga psikolog.

Larangan keterlibatan ASN dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tentunya juga telah diatur oleh PP 53/ 2010 yang dicabut dengan PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur bahwa ASN harus menjunjung tinggi etika dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

<https://puslatbangkdod.lan.go.id/>



Jumlah ASN di semester I di Tahun 2024 mencapai 4.758.730 dengan 1.033.000 orang (22%) merupakan ASN instansi pusat dan sisanya, sebanyak 3.725.730 orang (78%) bekerja di instansi daerah (BKN, 2024). Menkominfo sebelumnya menyebutkan 30 persen dari ASN melek digital, sementara data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa di tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 orang dari total populasi 278.696.200 jiwa, dengan tingkat penetrasi internet tinggi hingga 79,5% yang berarti hampir 80% dari populasinya berisiko terpapar konten judi online. Sementara itu, 'celah' keterlibatan ASN juga cukup besar dengan kemudahan akses internet yang dimiliki. Kemudahan mengakses konten judi dan pinjaman online, beraneka ragam bentuk judi online juga dinilai semakin mempermudah orang terjatir dalam 'candu' judi dan menjadi tantangan besar bagi pemberantasannya.

Secara ekonomi, perjudian online menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi individu dan keluarga, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Arifina & Yusnadi, 2024). Laporan PPAK Tahun 2023 melaporkan sebanyak 3.295.310 orang bermain judi online dengan transaksi sebanyak 168 juta dan total akumulasi perputaran dana sebanyak Rp. 327 triliun dan di semester I tahun 2024, dilaporkan sebanyak Rp. 13,2 triliun perputaran dana judi online.

Secara tidak langsung, keterlibatan PNS dalam lingkaran judi online ataupun pinjaman online dapat berdampak pada kinerja organisasi dan penurunan pelayanan publik. Terdapat urgensi untuk mengatasi judi online dan terjatir pada pinjaman online di Indonesia, dimana kurangnya regulasi memperburuk dampak negatif pada masyarakat secara berkelanjutan.

DESKRIPSI MASALAH

Dengan hampir 80% masyarakat berpotensi terpengaruh, Indonesia kini menghadapi kondisi darurat judi online & pinjaman online. Dampaknya tidak hanya pada keuangan individu, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Setidaknya terdapat beberapa penyebab masalah judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) di lingkungan Pemerintah, yaitu:

Faktor Ekonomi dan Gaya Hidup

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama mengapa PNS terlibat dalam judi online. Banyak PNS yang masih menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk mendapatkan uang secara "instan" guna memenuhi kebutuhan dan memenuhi gaya hidupnya. Kebiasaan ini menunjukkan adanya pola pikir mencari solusi finansial yang cepat tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Dengan logika yang sama, judi online menjadi daya tarik karena menawarkan ilusi keuntungan besar dalam waktu singkat. Sayangnya, pola pikir instan ini seringkali justru membuat terjebak dalam lingkaran hutang dan kerugian finansial yang lebih besar.

Literasi Keuangan yang Minim

Salah satu penyebab utama terjadinya darurat judi online adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Banyak individu yang belum memahami cara mengelola keuangan dengan baik, seperti membuat anggaran, menabung, atau mengelola utang secara sehat. Akibatnya, mereka cenderung mencari solusi instan untuk memperbaiki kondisi keuangan, dan judi online sering kali dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan uang dengan cepat. Di sisi lain, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting dalam memperburuk situasi ini. Kesulitan ekonomi, seperti rendahnya pendapatan, tingginya biaya hidup, atau tekanan utang, mendorong individu untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan atau menutupi kekurangan finansial. Kombinasi antara rendahnya literasi keuangan dan tekanan ekonomi menciptakan kondisi yang ideal bagi judi online untuk tumbuh subur dan menjebak lebih banyak korban. Tanpa pemahaman keuangan yang memadai dan solusi ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat akan semakin rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh judi online.

Lingkungan sosial

Lingkungan sosial yang mendukung atau membiarkan perilaku judi online dapat memperparah dampaknya, termasuk meningkatnya risiko kecanduan, kerugian finansial, dan gangguan hubungan sosial. Orang yang terjebak dalam lingkungan seperti ini sering kali sulit untuk melepaskan diri karena adanya tekanan untuk tetap "menyesuaikan diri" atau ketergantungan pada validasi dari kelompoknya. Bahkan perjudian daring juga dikaitkan dengan peningkatan angka kejahatan seperti pencurian dan penipuan, yang dilakukan oleh individu yang terjebak dalam kecanduan judi dan mencari cara untuk membiayai kebiasaan buruk mereka (<https://www.kompas.id>).

TEMPO

Menu Harian Mingguan **Tempo Plus**

Ekonomi Ekonomi Sinyal Pasar Bisnis Kelestarian

ASN di Boyolali Terjerat Utang Pinjol, Pinjam Rp 900.000 Bungkak Jadi Rp 75 Juta

Seorang ASN di Boyolali menanggung utang yang ia pinjam dari pinjol. Dari Rp 900.000 bungkak jadi Rp 75 Juta dalam tempo dua bulan.

tikjatim

Home Berita Sepakbola Hukum & Kriminal Budaya Wisata Kuliner

Terjerat Utang Pinjol, ASN Pemkot Pa

Rampas Tas Pegawai Koperasi

BERITA SATU Masukkan kata pencarian

Nasional Nusantara Ekonomi Internasional Sport Life

Bersatu Kami Pikkada **BI-Plus** NETWORK Indeks

HEADLINE Judi Kader Hingga Wacana Kepala Daerah Dipin OPD **Inflasi Masih Tinggi: Suku Bunga The Fed**

Home **Ekonomi** ADVERTISEMENT

Guru ASN Terjerat Pinjol untuk Gaya Hidup

Rabu, 8 Mei 2024 | 16:02 WIB



Adanya kesempatan dan peluang

Di tengah sebaran internet yang semakin baik dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, akses terhadap layanan berbasis online menjadi semakin mudah. Hal ini tidak hanya berdampak positif dalam memperluas konektivitas dan mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga membuka peluang bagi individu untuk terpapar pada hal-hal negatif, seperti judi online dan pinjaman online. Judi online, khususnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang, termasuk PNS, baik untuk sekedar mencoba peruntungan maupun mengobati rasa penasaran. Pada awalnya, mungkin hanya melihatnya sebagai hiburan atau cara cepat mendapatkan keuntungan. Namun, sifat judi yang dirancang untuk memberikan sensasi “menang” menciptakan efek kepuasan sementara yang mendorong seseorang untuk terus bermain, bahkan ketika kekalahan mulai menumpuk. Kondisi ini berpotensi memunculkan kecanduan yang sulit dihentikan, sehingga judi online menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan finansial dan mental mereka yang terjebak di dalamnya.



ALTERNATIF SOLUSI



Upaya memberantas dan menurunkan angka judi online di kalangan ASN memang menjadi tantangan besar, mengingat sudah diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal baik ini diikuti oleh beberapa kementerian/lembaga/daerah yang juga telah membuat edaran terkait upaya mengatasi masalah ini. Beberapa alternatif solusi yang dapat ditawarkan pada policy brief ini sebagai berikut:



Peningkatan Kesejahteraan fisik dan mental ASN

Untuk mengurangi beban tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kebijakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan ASN yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kondisi kekinian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kecenderungan ASN mencari jalan pintas (berjudi) untuk mencukupi kebutuhan hidup atau mencari kekayaan. Dengan adanya tunjangan yang memadai, ASN cenderung tidak merasa tertekan secara finansial dan lebih kecil kemungkinannya untuk mencari sumber penghasilan tambahan lain melalui jalan yang tidak sah.

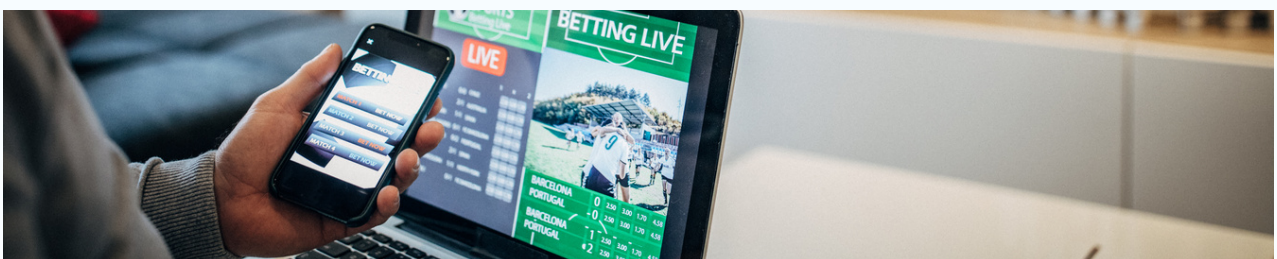
ASN yang terlibat dalam praktek judi online juga dapat disebabkan masalah psikologis atau tekanan emosional. Karenanya, tidak hanya kesehatan fisik ASN yang perlu diberikan fasilitas Asuransi Kesehatan (BPJS) namun perlu juga memberikan perhatian kepada kesehatan mental ASN. Dalam hal ini pimpinan K/L/daerah dapat memfasilitasi ASN nya mendapatkan konseling dari psikolog untuk membantu ASN mengatasi stres, kecemasan, atau masalah pribadi lainnya.



Edukasi dan Literasi Keuangan digital

Tak dipungkiri, di era modern saat ini aksesibilitas terhadap produk keuangan digital sangat massif sehingga ASN perlu membekali diri dengan meningkatkan literasi keuangan agar dapat mengelola keuangan secara bijak. Peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan dengan pengembangan kompetensi ASN melalui Pelatihan/bimtek/*blooming competency* pengelolaan keuangan, investasi, dan entrepreneur sehingga ASN dapat sehat secara finansial dan dapat memanfaatkan penghasilan secara produktif.

Edukasi mengenai dampak negatif judi online terhadap kondisi keuangan juga sangat penting dilakukan untuk membangun kesadaran seluruh ASN. Penyuluhan dan Kampanye kesadaran akan bahaya perjudian (anti judi) harus dilakukan secara massif melalui berbagai kanal/saluran komunikasi. Pada unit terkecil instansi/perangkat daerah dengan melibatkan fungsi SDM dan kehumasan instansi. Pada skala yang lebih luas (K/L/Pemda), pelaksanaan kampanye dapat menggandeng lembaga pendidikan, media, dan LSM, adapun di level pemerintah daerah, peran partisipasi masyarakat juga sangat penting, yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta organisasi yang paling kecil di masyarakat yaitu RT, PKK dan dasawisma untuk menyebarkan informasi tentang bahaya judi online.



Fasilitasi media pelaporan dan aksesibilitas rehabilitasi

K/L/Pemda perlu menyiapkan media/saluran pelaporan yang aman dan terjaga kerahasiaannya bagi ASN yang ingin melaporkan kasus judi online yang terjadi di organisasinya. Tidak hanya itu, wadah ini juga memfasilitasi pelaporan ASN pelaku judi online maupun keluarganya yang ingin mendapatkan rehabilitasi kecanduan judi online. Hasil laporan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan pegawai secara langsung oleh atasan ASN apabila ditemukan indikasi yang tidak parah, dan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait untuk program pemulihan, baik secara medis maupun psikologis bagi ASN yang terindikasi kecanduan parah.

K/L/Pemda dalam hal ini pimpinan organisasi dapat menerapkan sistem pengawasan yang ketat dengan cara memonitor/melacak aktivitas online pegawai yang menggunakan perangkat kerja dan jaringan internet kantor dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti bermain judi online. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah K/L/Pemda bekerjasama dengan penyedia layanan internet/provider melakukan pembatasan akses internet/pemblokiran ke situs-situs judi online pada internet yang dikelola K/L/Pemda. Penegakan hukum yang tegas mulai dari sanksi disiplin sampai pada pemecatan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan K/L/Pemda bagi ASN yang terbukti dengan sengaja melakukan praktik judi online.

REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa alternatif solusi yang ditawarkan policy brief ini, kami merekomendasikan K/L/Pemda untuk melakukan alternatif solusi yang ketiga di jangka pendek ini yaitu menyediakan fasilitas media pelaporan yang aman yang terjaga kerahasiaannya bagi pelapor tindak perjudian online dan membantu upaya rehabilitasi ASN yang kecanduan judi online berdasarkan tingkat keparahannya. Adapun alternatif solusi selanjutnya yang dapat dilakukan di jangka menengah yaitu edukasi dan literasi keuangan digital, peningkatan kesejahteraan fisik dan mental ASN. Langkah tambahan lainnya seperti mengoptimalkan peran koperasi ASN untuk pengelolaan pinjaman pegawai, atau memanfaatkan PINDAR (Pinjaman Daring) yang legal dan diawasi OJK. Selain itu, sebaiknya ASN juga memiliki bantuan layanan konsultasi keuangan (*financial advisor*) di lingkungan pemda agar ASN 'melek keuangan' dan terhindar dari jeratan judi online dan pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara. 2024. Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2024
- PPATK. 2023. Mendunia, 2 Dekade Menjaga Indonesia Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023
- PPATK. 2024. Milestone Laporan Semester | Mid-year Report
- surabaya.kompas.com. 19 PNS di Lumajang Terjerat Pinjol, Terungkap karena Indisipliner. Retrieved from <https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/01/141022078/19-pns-di-lumajang-terjerat-pinjol-terungkap-karena-indisipliner>
- jalin.co.id. Indonesia Darurat Judi Online: Simak Penyebab dan Solusi yang Dapat Diterapkan. Retrieved from <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/indonesia-darurat-judi-online-simak-penyebab-dan-solusi-yang-dapat-diterapkan>
- cnnindonesia.com. Heru Budi Buka Suara soal 165 PNS Satpol PP DKI Terjerat Judi Online. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240924195433-20-1147905/heru-budi-buka-suara-soal-165-pns-satpol-pp-dki-terjerat-judi-online>
- tribunnews.com. Cerita PNS Terjerat Pinjol, Utang Rp900 Ribu Beranak Jadi Rp75 Juta, Tergiur Tawaran Menarik. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/18/cerita-pns-terjerat-pinjol-utang-rp900-ribu-beranak-jadi-rp75-juta-tergiur-tawaran-menarik>
- denpasar.kompas.com. Mantan Bendahara Desa di Buleleng Korupsi Rp 255 Juta untuk Bayar Utang Pinjol. Retrieved from <https://denpasar.kompas.com/read/2023/09/29/161246478/mantan-bendahara-des-a-di-buleleng-korupsi-rp-255-juta-untuk-bayar-utang>
- kemdikbud.go.id. 80.000 ASN Kemendikbudristek Perkuat Literasi Digital Melalui Program LDSP Kemenkominfo. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/03/80000-asn-kemendikbudristek-perkuat-literasi-digital-melalui-program-ldsp-kemenkominfo>
- kompas.id. Candu Perjudian "Online". Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/24/candu-perjudian-online>
- finance.detik.com. ASN Dilarang Main Judi Online & Ngutang di Pinjol!. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7679552/asn-dilarang-main-judi-online-ngutang-di-pinjol>